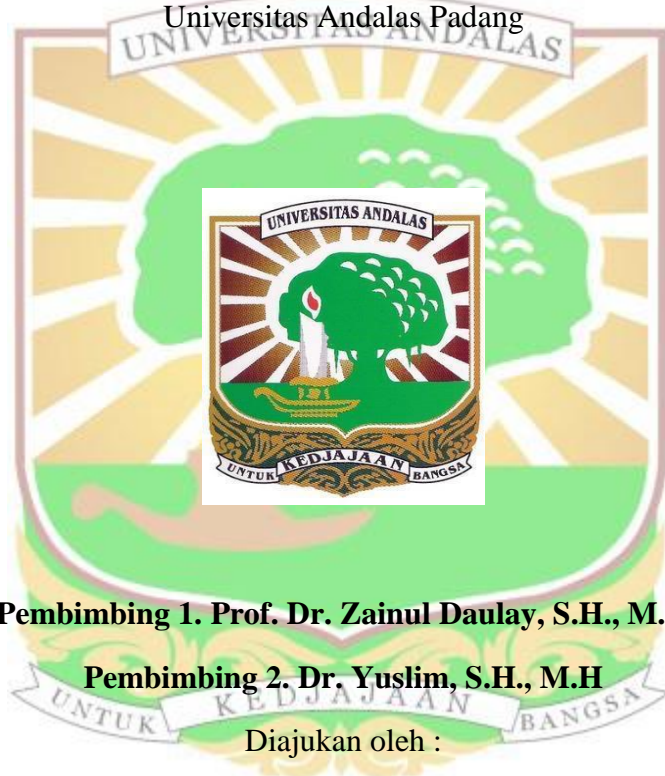


PELAKSANAAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH  
NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PROTOKOL NOTARIS  
DI KOTA PADANG

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum  
Universitas Andalas Padang



**Pembimbing 1. Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H**

**Pembimbing 2. Dr. Yuslim, S.H., M.H**

Diajukan oleh :

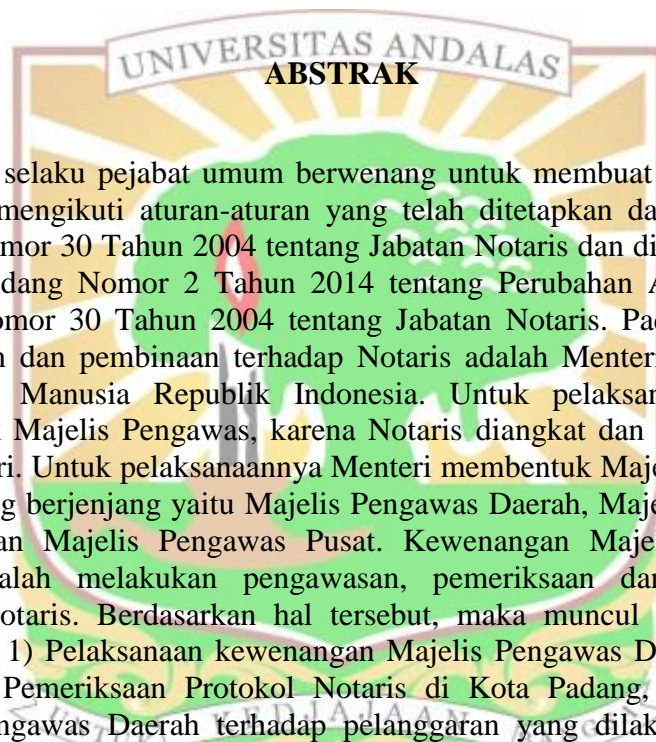
**ELVI SANDRIYANI**

**NIM : 1420123012**

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2016

**PELAKSANAAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH  
NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PROTOKOL NOTARIS  
DI KOTA PADANG**

(Elvi Sandriyani, NIM.1420123012, Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 115 halaman)

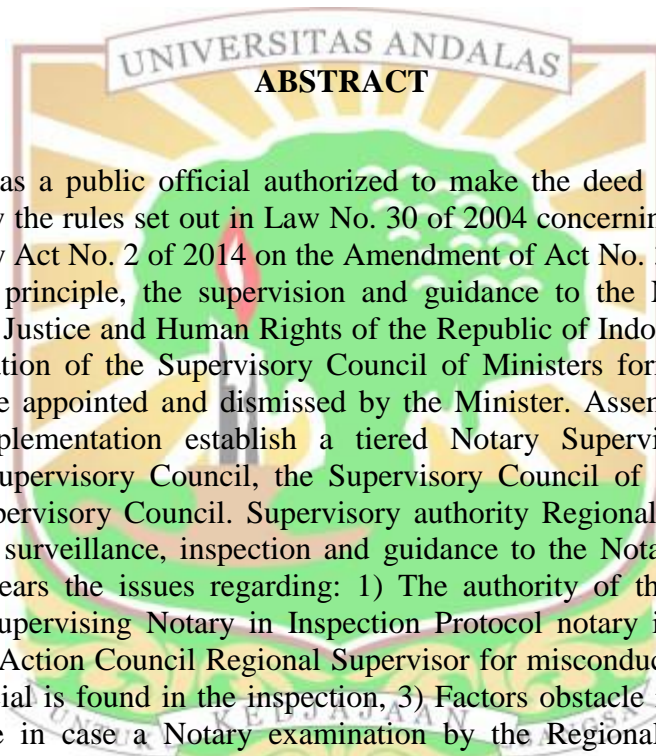


Notaris selaku pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik dan harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada prinsipnya pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Menteri membentuk Majelis Pengawas, karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Untuk pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang berjenjang yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris. Berdasarkan hal tersebut, maka muncul permasalahan mengenai : 1) Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam hal Pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Padang, 2) Tindakan Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris selaku pejabat umum yang ditemukan dalam pemeriksaan, 3) Faktor-faktor penghambat dalam melakukan pengawasan dalam hal pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Padang. Metode penelitian bersifat deskriptif analisis. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan/atau survey di lapangan, data skunder diperoleh dari perundang-undangan dan buku-buku, yang dianalisa secara kualitatif untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan landasan teori dan peraturan perundang-undangan. Populasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah dengan sampel secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam hal pemeriksaan protokol Notaris di Kota Padang belum terlaksana secara optimal, meskipun dapat dikatakan efektif dengan adanya peningkatan terhadap pelaksanaan kewajiban Notaris dalam hal pemeriksaan terhadap protokolnya.

Kata kunci : Notaris, Pengawasan, Majelis Pengawas Daerah Notaris

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL SUPERVISORY AUTHORITY OF  
ASSEMBLY IN THE EXAMINATION PROTOCOL NOTARY  
IN THE PADANG CITY**

(Elvi Sandriyani, NIM.1420123012, Master of Notary Law Faculty Andalas  
Universitas, Padang, 115 pages)



Notary as a public official authorized to make the deed authentic and must follow the rules set out in Law No. 30 of 2004 concerning Notary and amended by Act No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 on Notary. In principle, the supervision and guidance to the Notary is the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia. For the implementation of the Supervisory Council of Ministers formed, because Notaries are appointed and dismissed by the Minister. Assembly Minister for its implementation establish a tiered Notary Supervisory namely Regional Supervisory Council, the Supervisory Council of Regional and Central Supervisory Council. Supervisory authority Regional Assembly is conducting surveillance, inspection and guidance to the Notary. Based on this, it appears the issues regarding: 1) The authority of the Council of Regional Supervising Notary in Inspection Protocol notary in the city of Padang, 2) Action Council Regional Supervisor for misconduct Notary as a public official is found in the inspection, 3) Factors obstacle in conducting surveillance in case a Notary examination by the Regional Supervisory Council of Notaries of Padang. The research method is descriptive analysis. The primary data obtained directly from interviews and / or surveys on the field, the secondary data obtained from legislation and books, were analyzed qualitatively to explain the phenomenon by using the theoretical basis and legislation. Notary Population and Regional Supervisory Council with a purposive sample. The results showed that the implementation of the Regional Supervisory Council the authority in terms of inspection protocols Notary Notaries in Padang have not been implemented optimally, although it can be said to be effective with an increase in the implementation of the Notary obligations in terms of the examination of the protocol.

Keywords: Notary, Surveillance, Regional Supervisory Council of Notaries